

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal (*signalling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan memberikan informasi dikarenakan terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar sebab, perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga lebih rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Sari & Sudjiman, 2020).

*Signalling theory* menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan catatan atau gambaran

baik untuk keadaan masa lalu saat ini maupun keadaan masayang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidak seimbangan informasi yang dimiliki antara *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan inilah yang disebut asimetris informasi yang dapat terjadi jika satu pihak dapat mengakses informasi sedangkan pihak lain tidak mampu melakukannya sehingga *agent* dapat menggunakan informasi yang diketahui untuk memanipulasi pelaporan keuangandalam usaha memaksimalkan utilitas (Scott, 2019).

Teori sinyal dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat dasar manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat dasar manusia yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*). (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded nationaliti*) dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan (Ujiyantho, 2018).

## **2. Teori *Packing Order* (*Pecking Order Theory*)**

*Pecking Order Theory* dikemukakan oleh Gordon Donaldson di tahun 1961 melalui penelitian berjudul “*Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and Determination of Corporate Debt capacity*” dijelaskan bahwa awal konsep dari teori ini yaitu perusahaancenderung

mendahulukan sumber dana internal dalam pembayaran dividen dan pendanaan investasinya, apabila dana tersebut tidak cukup maka menjadikan dana eksternal sebagai tambahan (Yulianti & Finatarian, 2021).

Menurut (Adam & Faridah, 2022) teori *pecking order* menyatakan bahwa perusahaan memilih sumber pendanaan sesuai dengan urutan risikonya, dalam hal ini perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal terlebih dahulu. Apabila dana internal tidak mencukupi perusahaan menggunakan dana eksternal (utang) untuk membiayai perusahaan. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal eksternal adalah berupa dana yang berasal dari pihak kreditur. Dalam teori ini dinyatakan perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi mempunyai utang yang rendah.

Teori *pecking order* mengimplikasikan adanya asimetri informasi antar manajer sebagai agen dan pemegang saham dan pemegang saham sebagai prinsipal. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Adanya kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan maka manajemen mempunyai kesempatan untuk

memaksimalkan mereka yang salah satunya dengan melakukan manajemen laba (Syanthi, 2020).

### 3. Manajemen Laba (*Earning Management*)

#### a. Pengertian Laba

Menurut Suyono (2019) laba merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Dalam hal ini Wild dan Subramanyan memberi laba menjadi dua bagian yaitu laba ekonomi dan laba akuntansi.

1. Laba ekonomi biasanya merupakan arus kas ditambah dengan perubahan nilai wajar aktiva. Berdasarkan definisi ini laba mencakup baik komponen yang sudah direalisasi ( arus kas) maupun yang belum (laba rugi kepemilikan). Laba ekonomi ini dibedakan menjadi 2 yaitu laba permanen atau juga disebut laba berkelanjutan (*sustainable*) atau laba yang dinormalkan (*normalized*) merupakan rata-rata stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umumnya dan laba operasi yaitu laba yang merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan.
2. Laba akuntansi merupakan laba yang diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual sehingga dalam hal ini pengukurannya kurang mencerminkan realitas ekonomi.

#### b. Pengertian Manajemen Laba

Schipper 1989 dalam (Suyono, 2019), manajemen laba dapat didefinisikan sebagai “intervensi” manajemen dengan sengaja dalam

proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi”. Sering kali prses ini mencakup mempercantik laporan keuangan terutama angka yang paling bawah yaitu laba.

Menurut Sulistyanto (2018), manajemen laba adalah upayamanajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagaicecurangan. Manajemen laba merupakan suatu tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost*. Manajemen laba juga merupakan bentuk *efficientcontracting*, dimana manajemen laba memberikan kepada manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan sejauh apa yang dilakukan masih dalam ruang lingkup principal akuntansi.

Menurut Suyono (2019) terdapat banyak alasan melakukan manajemen laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan usaha mendapat subsidi pemerintah.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer untuk mengatur laba dengan cara memanipulasi angka-angka pada laporan keuangan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan kemauan pihak manajer, sehingga memberikan gambaran yang bias bagi pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer, dapat menyesatkan pengguna laporan.

c. Strategi Manajemen Laba

Menurut Suyono (2017) terdapat tiga jenis strategi manajemen laba antara lain:

1. Meningkatkan laba yaitu dilaporkan pada periode ini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Pada skenario ini akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual ini, sehingga dapat meningkatkan laba.
2. *Big bath* yaitu dilakukan melalui penghapusan (*write off*) sebanyak mungkin pada satu periode.
3. Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini manajemen meningkatkan laba atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fruktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau “bank” dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

d. Pendekatan Manajemen Laba

Praktik manajemen laba di dalam perusahaan merupakan hal yang logis dimana jika fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian terdapat berbagai proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba dalam berbagai upaya yang digunakan manager dalam manajemen laba.

e. Pendekatan Manajemen Laba

Praktik manajemen laba di dalam perusahaan merupakan hal yang logis dimana jika fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkapkan praktik manajemen laba tersebut ada berbagai proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba dalam berbagai upaya yang digunakan manager dalam manajemen laba.

Menurut Ariesanti (2018) ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk proksi manajemen laba yaitu:

1. Pendekatan yang didasarkan pada model agregat akrual, misal model (Jones, 1991) dan *modified Jones*.
2. Pendekatan yang didasarkan pada model spesifik akrual, misal (Beneish, 1997) serta (Beaver et al., 2000).
3. Pendekatan berdasarkan distribusi frekuensi, fokusnya adalah perilaku laba yang dikaitkan dengan spesifik benchmark dimana praktik manajemen laba dapat dilihat dari banyaknya frekuensi perusahaan yang melaporkan laba di atas atau di bawah benchmark, misal

Burgstahler, (Hail & Leuz, 2016) serta Meyers dan Skinner (1999). Pendekatan ini berasumsi bahwa manager memiliki motivasi untuk mengatur tingkat keuntungan agar sesuai dengan benchmarks yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Yulianti & Finatarian, 2021).

f. Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Bahkan banyak negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang utama. Selain itu, pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa, atau dana, sehingga beban pajak harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya (Yulianti & Finatarian, 2021).

Manajemen laba adalah upaya manager perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dalam tujuan untuk mengetahui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2018). Istilah mengelabui dan mengintervensi inilah yang diartikan sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sementara pihak lain tetap menganggap bahwa aktivitas manajerial ini bukanlah sebagai tindak kecurangan.



a. Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK NO. 46)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut PSAK juga turut mengatur masalah perhitungan pajak termasuk pajak penghasilan yaitu tahun 1998,1998, Ikatan Akuntan Indonesia (IAK) menerbitkan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) mengenai akuntansi PPh. Dalam perkembangannya, Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan peraturan tentang perhitungan pajak., dimana dasar pengenaan pajak khususnya pada unit bisnis menggunakan laporan keuangan yang dibuat oleh unit bisnis menggunakan laporan keuangan fiskal, artinya laporan keuangan yang dibuat oleh unit bisnis tersebut kemudian dikoreksi berdasarkan aturan-aturan pajak yang berlaku.

b. Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Asset*)

Pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut Undang-undang pajak (Perwita et al., 2018). Aktiva pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangi dan sisa kompensasi kerugian. Biasanya aktiva pajak

tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak yang akan datang (Perwita et al., 2018).

c. Beban Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Expense*)

1) Pengertian pajak tangguhan

Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*reconverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Adam & Faridah, 2022). Menurut PSAK No.46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan menurut PSAK No.46 (IAI, 2009:8) Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang.

Selain itu, menurut Ningsih (2018) “pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang

sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) sepanjang menyangkut perbedaan temporer”.

2) Dasar pengenaan pajak

a. Dasar Pengertian Pajak Aktiva yakni jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal terhadap setiap mafaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saatmemulihkan nilai tercatat aktiva tersebut.

b. Dasar pengenaan pajak kewajiban merupakan nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkanpada masa mendatang.

3) Penentuan pajak tangguhan

Pengakuan pada pajak tangguhan

Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Liabilities*), yaitu pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fiskal bahwa adanya kemungkinan pemulihan asset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Akan tetapi, apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan satandar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban.

4) Jurnal pengakuan pajak tangguhan

*Deffered Tax Asset*                      xxx

*Deffered Tax Income*                      xxx

#### 4. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Aditama & Purwaningsih, 2019).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selalu berusaha untuk memmperbaharui peraturan-peraturan perpajakan Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, disisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran hutang pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Ningsih, 2018).

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut kena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setaiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Menurut (Suandy, 2018) setidaknya terdapta tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan rasio pajak sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategi*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur pajak (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*). Sedangkan motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:
  1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
  2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)
  3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Menurut Asmedi & Wulandari (2021) dalam *tax Planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

- a) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) yaitu strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan

teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

- b) *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak) yaitu strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan penyeludupan ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu seorang *tax planner* yang tidak direkomendasikan *tax evasion*.
- c) *Tax Saving* (Penghematan Pajak) yaitu merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adam & Faridah (2022) dan diketahui bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda & Febrianti (2019) yang melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan AkruaI Terhadap Indikasi Adanya Praktik Manajemen Laba” diketahui bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian lain dilakukan oleh Aditama & Purwaningsih (2020) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen laba. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Dalam tabel 2.1 menunjukkan hasil penelitian terdahulu mengenai kemampuan aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dalam mendeteksi manajemen laba.



**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama ( Tahun )	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arif Rahmad Hakim, dan Sugeng Proptoyo (2018)	Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan	Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba
2	Adrumi Mustikaning, Perwita, Titiek Puji Astuti, Agung Nurmansyah ( 2018)	Analisis Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan, dan AkruaI sebagai Priktor pada Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Analisis Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan dan AkruaI sebagai Priktor	Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, sedangkan Beban Pajak Tangguhan dan AkruaI berpengaruh terhadap Manajemen Laba



3	Deni dan Anna(2018 )	Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Pengaruh Book Tax Differences	Hasil analisis menunjukkan bahwa LPBTD dan LNBTD berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba
4	Ratna Eka Puji Astuti (2018:5)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan	Perencanaan Pajak dan beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba

5	Tatiana et al.,(2018 )	Book Tax Differences, Earning Persistence and tax Planning Before and After The Adoption of IFRS in Brazil	Variabel Dependen: Affter The Adoption of IFRS in Brazil Variabel Independen: Book Tax Defference, Earning Persistence dan Tax Planning	Book Tax Differences memiliki Pengaruh Secara Positif dapat Memberikan Informasi Tentang Besaran Akrual dan Dapat Memprediksi Persistensi Laba
6	Laluk dan Nova (2019 )	The Effect Of Deffered tax and Tax Planning Toward Earning Management Practice: An Empirical Study On Non Manufacturing Companies Listed inIndonesiaStock Exchange in the periode of 2008-2012	Variabel Dependen: Manajemen Practice An Emprical Study On Non Variabel Independen: The Effec Of Deffered tax and Tax planning Toward Earning	Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan dan Perencanaan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Manajamen Laba.

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

7	Dridi dan Adel (2019)	Book-Tax Differences and the Persistence of Earnings and Accruals: Tunisian Evidence	Variabel Dependen: Tunisian Evidence Variabel Independen: Book-Tax differences and the Persistence of Earning and Accruals	Menunjukkan Bahwa Boox Tax Differences Berpengaruh Terhadap Persistensi Laba dan Accrual
8	Budi Setyawan dan Harnovinsha (2019)	Profitabilitas Perencanaan terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen: Manajemen laba Variabel Independen: Profitabilisat Perencanaan	Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba, sedangkan Frofitabilitas Berpengaruh Signifikan terhadap Manajemen laba

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

9	Thomas Junior Sibarani, Nurhidayat, Surtikanti (2018:19)	Analisis pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Discretionary Accuals dan Arus Kas Operasional terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Discretionary Accuals dan Arus kas dan Operasional	Beban Pajak Tangguhan, Aktual Diskresioner, dan Arus Kas Operasi berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba
10	Scoot <i>et al.</i> , (2020)	Deferred Tax Item as Earnings Management Indicators	Variabel Dependen: Management Indicator Variabel Independen: Deffered Tax Item As Earning	Beban Pajak Tangguhan secara Negatif Berpengaruh Terhadap Praktik Manajemen Laba.

Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai jurnal

### C. Rerangka Pemikiran

Berpijak pada keterbatasan pengkajian dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kali ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diantaranya Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak. Masing-masing faktor memiliki pengaruh masing-masing terhadap manajemen laba (Sari & Sudjiman, 2020).

#### 1. Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Berpijak pada keterbatasan pengkajian dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kali ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diantaranya Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak. Masing-masing faktor memiliki pengaruh masing-masing terhadap manajemen laba (Sari & Sudjiman, 2020).

Menurut (Sari & Sudjiman, 2020) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*deferred taxasset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian dapat dikompensasi. Pelaporan keuangan seperti *financialdistress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manager dapat melakukan rekayasa laba atau *earnings management* dengan memperbesar atau

memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi (Asmedi & Wulandari, 2021).

Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan dengan menggunakan pendekatan aset dan *liability method*. Dalam pendekatan aset, apabila nilai tercatat aset lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak kewajiban maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk pengurang pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aset pajak tangguhan (*Deferred Tax asset*). Dalam PSAK No.46 menyebutkan bahwa nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Oleh karena itu diperlukan kemampuan pertimbangan manajemen dalam menilai saldo aset pajak tangguhan dan cadangan aset pajak tangguhan. Sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif. Hal ini memicu terjadinya manajemen laba karena setiap tahun manager harus membuat penilaian untuk menentukan apakah akan mencatat atau akan menyesuaikan aset pajak tangguhan dan besarnya penyisihan aset pajak tangguhan. Selain itu, karena tidak adanya rumus pasti untuk menentukan besarnya penyisihan aset pajak tangguhan, maka manager memiliki kebebasan dalam penentuan besarnya penyisihan aset pajak tangguhan (Perwita et al., 2018).

Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan antara aset pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan dapat

digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*) (Adam & Faridah, 2021).

Hubungan antara aktiva pajak tangguhan dengan manajemen laba menurut penelitian dari (Tiara Timuriana, 2019) dan (Adam & Faridah, 2021) mengungkapkan bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

## 2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan intensif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manager dapat melakukan rekayasa laba atau *earnings management* dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi (Asmedi & Wulandari, 2021).

Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan (Adam & Faridah, 2019) Manajemen laba merupakan peluang.

Bagi manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dengandemikian memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan ( Jayanti et al., 2020).

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba. Menurut Ariesanti (2020), Penghematan pajak menjadi insentif bagi manajer (khususnya manajer yang mengalami *net operating loss*) untuk mempercepat pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan. Dampak dari kompensasi rugi terhadap laba adalah restitusi tersebut didasarkan atas tarif pajak yang berlaku pada tahun pajak.

Menurut Astutik & Mildawati (2019) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Hubungan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba menurut penelitian dari Jayanti et al., (2020) mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

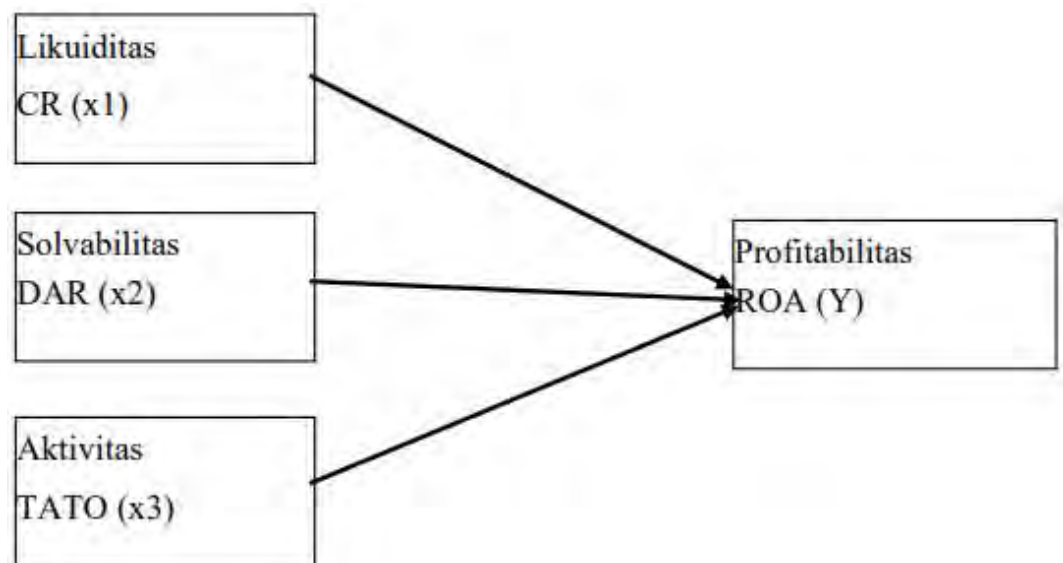
### 3. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.



Pada umumnya penekanan Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk menimbulkan kewajiban pajak (Suandy, 2018).

Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba menurut penelitian dari (Astutik & Mildawati, 2019) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

#### D. Hipotesis

Berdasarkan bukti empiris dan permasalahan yang terjadi maka dapat disimpulkan suatu jawaban yang bersifat sementara, sebagai berikut:

- H1 Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor Industri Dasar dan Kimia.
- H2 Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen

laba pada perusahaan manufaktur sub sektor Industri Dasar dan Kimia.

H3 Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor Industri Dasar dan Kimia.

